

Profil Pekerja Anak di Kabupaten Subang

R. Maman Sukherman^{*)}

Abstract

Population Census 2000 which is done, precisely in October 2000, was one strength effort from Central Government to supply of qualified and accurate population data. From the result of SP2000's compilation which is done, a portrait about : children worker in Subang Regency was get. Theoretically, the arising of children worker was by product from the activity of socio – economic development program planning in each regency/municipality. Non parametrical statistics test, T-Kruskal wallis Test, was done to see the link between economical region with children worker ratio, the other was used HRD index to see worker problem leveling each district.

Key Words : Compilation of SP-2000, children worker, Subang, T-Kruskal Wallis Test, HRD index

Abstrak

Sensus Penduduk (SP) - 2000 yang dilakukan, tepatnya Oktober Tahun 2000, merupakan suatu upaya yang kuat dari Pemerintah Pusat untuk menyediakan data kependudukan yang handal dan akurat. Dari Hasil kompilasi SP-2000 yang dibuat, diperoleh suatu portrait tentang "Pekerja Anak di Kabupaten Subang". Secara teoritis, munculnya sejumlah pekerja anak merupakan by product (produk ikutan) dari suatu pelaksanaan rencana program pembangunan sosial-ekonomi di masing-masing kabupaten / kota. Suatu uji Statistika non-parametrik, uji T-Kruskal Wallis, digunakan untuk mengetahui kaitan antar daerah perekonomian dengan rasio pekerja anak; selain itu digunakan pula indeks SDM. Untuk mengetahui derajat masalah ketenagakerjaan di masing-masing kecamatan.

Kata Kunci : Kompilasi SP-2000, Pekerja Anak, Subang, Uji T-Kruskal Wallis, indeks SDM.

^{*)} Bekerja pada BPS Jawa Barat, Anggota IPADI Jawa Barat.

Pendahuluan

Hasil penelitian Irwanto dari Pusat Penelitian UNIKA-Atmajaya Jakarta; *Pekerja Anak di Tiga Kota Besar* mengungkapkan, kemiskinan memang sering kali menjadi penyebab utama seorang anak bekerja. Di sisi lain, wanita sebagai kepala rumah tangga dan adanya suami yang tidak bekerja (menganggur); dan membiarkan anak-anak mereka bekerja untuk menopang ekonomi rumah tangga merupakan faktor pendorong dari munculnya fenomena anak-anak bekerja.

BPS menyebutkan, *nilai garis kemiskinan* yang digunakan mengacu pada kebutuhan minimum 2100 kkal per kapita per hari ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang yang meliputi kebutuhan dasar untuk papan, sandang, sekolah, transportasi, serta kebutuhan rumah tangga dan individu yang mendasar lainnya. Besarnya nilai pengeluaran (dalam rupiah) untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan non makanan tersebut disebut *garis kemiskinan* (BPS, 2002, *Statistik Indo-nesia 2001*).

Dalam rangka mengatasi kemiskinan ini banyak peneliti yang menunjuk pendidikan sebagai unsur strategik. Adelman dan Morris (1973) serta Galbraith (1979) mengemukakan bahwa pendidikan merupakan langkah paling strategis di dalam usaha-usaha mengatasi kemiskinan. Akan tetapi dari suatu hasil penelitian lainnya terungkap, bahwa anak yang masuk ke dunia kerja tidak hanya semata-mata karena kemiskinan sebagai faktor pendorong, namun lebih banyak karena adanya faktor penarik yang kuat untuk menjadi pekerja anak (Sanie, 1997). Faktor penarik lainnya antara lain proses industrialisasi, modernisasi, dan era informasi terbuka yang menimbulkan konsumerisme pada anak-anak sehingga cenderung ingin memiliki kelebihan "*uang sendiri*".

Secara faktual, seperti yang terungkap dalam berbagai penelitian, ada dua latar belakang yang menjadikan anak-anak bekerja lebih dini dari usia yang direkomendasikan; yaitu faktor ekonomi dan faktor sosio-budaya. Lebih jauh, dari suatu kesimpulan yang dipaparkan UNICEF, ada tiga faktor utama yang mendorong anak-anak bekerja pada bidang kerja yang mengganggu tumbuh kembangnya mereka; yaitu: eksploitasi yang lahir dari kemiskinan, kurangnya pendidikan yang relevan, serta tradisi dan pola sosial yang menempatkan anak pada posisi yang rentan (BPS, Desember 2001 hal. 59).

Apapun alasan seorang tergelincir menjadi pekerja anak, *problem* (masalah) pekerja anak merupakan hal yang serius dikaitkan dengan keikutsertaan negeri ini dalam meratifikasi konvensi internasional mengenai anak. Stephen J. Woodhouse (1998) dari UNICEF mengungkapkan bahwa upaya perlindungan terhadap anak di Indonesia dipandang masih lemah dan cukup mengkhawatirkan ditandai dengan semakin banyaknya anak menjadi anak jalanan (anjali).

Bagi kalangan pemerintah, data pekerja anak akan membantu memecahkan permasalahan secara *intrinsik*. Untuk hal tersebut, dari kompilasi Sensus Penduduk Tahun 2000 dicobakan untuk memaparkan data Pekerja Anak Kabupaten Subang menurut wilayah administrasi Kecamatan; dengan harapan setidaknya dapat mengungkapkan wilayah kecamatan mana yang perlu mendapatkan *atensi* yang serius. Hal ini merupakan sesuatu yang menguntungkan, karena dalam survei-survei kependudukan yang lazim dilakukan; *design survei* (rancangan survei) hanya untuk mengestimasi kabupaten/kota sehingga agak sukar untuk memperoleh data estimasi kecamatan.

Selanjutnya, saat ini *atensi* terhadap masalah kependudukan bukan

hanya laju pertumbuhan penduduk (LPP), kepadatan penduduk, atau masalah pengangguran; akan tetapi sudah beranjak pada masalah kualitas hidup. Seperti kondisi masyarakat dilihat dari aspek *distribusi* (sebaran) pendapatan, *disparitas* (ketimpangan) pendapatan dan kemiskinan penduduk; bahkan pengamatan bukan hanya pada kesempatan kerja akan tetapi juga diamati segmen pekerja anak. Hal ini disebabkan semakin besar jumlah pekerja anak, mengindikasikan suatu fenomena semakin tidak sejahtera masyarakat ini.

Suatu penelitian dilakukan terhadap segmen penduduk usia (10-14) tahun yang bekerja. Seperti dijelaskan di atas data segmen penduduk tersebut diperoleh dari hasil kompilasi SP-2000; yang kemudian dikaitkan dengan ukuran makro ekonomi yang diperoleh dengan menerapkan kriteria UNIDO sebagai personifikasi daerah miskin.

Dalam tulisan ini, sebagai studi penelitian perpustakaan, dengan mengamati kriteria wilayah sesuai dengan kriteria UNIDO dilakukan suatu pengujian secara statistika adakah kaitan klasifikasi wilayah tersebut dengan besaran pekerja anak di Kabupaten Subang; diasumsikan bahwa daerah yang dikategorikan sebagai daerah tradisional merupakan daerah miskin.

Metodologi

Sumber Data

Secara teoritis bila diamati dari aspek kualitas, data yang baik akan memiliki beberapa sifat; yaitu : akurat, *cost-effective*, *up to date*, dapat dipercaya (*reliable*) dan dapat digunakan (*useable*) (Ri Levin, *Quantitative Approaches To Management*, 1986). Dengan mengamati berbagai rambu-rambu yang mendukung "kebaikan data", dipadu dengan konsepsi dan

definisi data yang penuh nuansa keilmuan; maka secara teoritis akan diperoleh suatu informasi yang baik. Dengan demikian benar tidaknya statistik akan diukur dari benar tidaknya data yang diperoleh.

Saat ini seringkali disebut pula sebagai *era informasi*, selain dikenal sebagai *era reformasi*. Dalam suatu era informasi, data merupakan suatu kebutuhan yang krusial; di mana bagi seseorang yang berfungsi sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) data tersebut merupakan salah satu unsur yang menjadi komponen dari *decision support system*. Selanjutnya data tersebut akan merupakan suatu informasi yang dapat mengungkapkan masalah yang dihadapi atau menjelaskan suatu masalah yang akan terjadi.

Lebih jauh, sumber data dalam artikel hasil penelitian ini ialah hasil kompilasi Sensus Penduduk Tahun 2000, di mana teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ialah sensus lengkap (*complete enumeration*). Publikasi Hasil Kompilasi Sensus Penduduk Kabupaten Subang dipaparkan dalam publikasi yang berjudul: "Karakteristik Penduduk Kabupaten Subang Menurut Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000" dengan No Katalog BPS: 2116.3213. Publikasi lain yang diterbitkan BPS dan BAPEDA. Jawa Barat, ialah "Analisis Komposisi Tenaga Kerja Per Kecamatan Di Jawa Barat Tahun 2000", yang memuat data penduduk berusia 10 Tahun ke Atas. Sehingga dengan dua sumber publikasi tersebut dapat diperoleh penduduk usia (10-14) tahun yang ikut partisipatif dalam bekerja.

Data profil perekonomian diperoleh dari publikasi BPS Kabupaten Subang yang diterbitkan dalam buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB.) Kabupaten Subang Menurut Kecamatan Tahun 1998-2001. Dari data ini diperoleh kinerja ekonomi masing-masing kecamatan, sehingga

diperoleh gambaran yang lebih lengkap dari kondisi sosio-ekonomi Kabupaten Subang.

Konsep dan Definisi

Terminologi anak akan dipengaruhi oleh berbagai keperluan yang secara teoritis agak sulit untuk dibakukan. Menurut Undang-undang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 21 tahun (Depsos, UU No 4/1979-Kesejahteraan Anak). Sedangkan menurut Undang-undang Ketenagakerjaan, Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 15 tahun (Depnaker, Undang-undang Ketenagakerjaan).

Untuk keperluan pembuatan artikel *Pekerja Anak Kabupaten Subang Tahun 2000*, pekerja anak adalah penduduk yang termasuk segmen anak dengan umur (10-14) tahun yang bekerja. Sebagaimana diketahui, dalam kurun waktu 1998-2002 ini sebagian besar publikasi ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh BPS tidak melansir data segmen penduduk usia (10-14) yang bekerja.

Suatu kriteria yang direkomendasikan UNIDO (*suatu badan PBB untuk pengembangan industri*) memilah-milah daerah berdasarkan kontribusi sektor industri pada aktivitas perekonomian :

1. Daerah yang masih tradisional (*% kontribusi sektor industri terhadap perekonomian di bawah 10 persen*).
2. Daerah transisi (*% kontribusi sektor industri terhadap perekonomian 10-20 persen*).
3. Daerah semi industri (*% kontribusi sektor industri terhadap perekonomian 20-30 persen*)
4. Daerah industri (*% kontribusi sektor industri terhadap perekonomian ≥ 30 persen*) (Thee Kian Wee, 1990; H. Suseno T.W., 1997).

Kriteria tersebut digunakan dalam kasus ini, sehingga dapat diperoleh informasi kecamatan mana yang masih dianggap tradisional atau kecamatan mana yang sudah memiliki kategori daerah industri.

Metode Kompilasi Analisis

Suatu teknik angka indeks digunakan untuk melakukan kompilasi indeks sumber daya manusia (SDM) dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Indeks SDM} = \frac{\text{TPAK Kecamatan (i)}}{\text{TPAK Kabupaten Subang}} \times 100$$

Besaran indeks SDM kecamatan yang melebihi angka seratus (angka indeks SDM kabupaten = 100,00), ditafsirkan bahwa kecamatan tersebut memiliki masalah ketenagakerjaan yang lebih berat dibandingkan kabupatennya. Sehingga dengan menggunakan teknik ini dapat diamati secara faktual dan dini masalah ketenagakerjaan di masing-masing kecamatan.

Suatu uji statistika non parametrik, yang dikenal dengan nama *Uji T-Kruskal Wallis*, diterapkan untuk mendeteksi adakah pengaruh kondisi daerah terhadap rasio pekerja anak; di mana secara formulasi :

$$T = \frac{12}{N(N+1)} \times [\sum (R_i)^2 / n_i] - 3(N+1)$$

Di mana :

T = merupakan nilai statistik, N merupakan banyaknya data kecamatan i,

n_i = merupakan jumlah anggota pada daerah klasifikasi i.

R_i = merupakan jumlah ranking data rasio pekerja anak per seribu penduduk yang bekerja di kecamatan pada daerah klasifikasi i.

Hasil besaran T –Kruskal Wallis yang diperoleh dibandingkan dengan angka yang diperoleh dari tabel dengan menggunakan *level of significance* 0,05 dan faktor $(k-1) = 2$ sebagai derajat kebebasan (*degrees of freedom*).

Profil Perekonomian Kabupaten Subang

Secara umum ada beberapa tugas utama pemerintah dalam perekonomian, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengatur penyediaan barang publik (alokasi), mengurangi inflasi dan pengangguran (stabilisasi), dan melaksanakan pemerataan (keadilan sosial) atau distribusi. Peran tersebut dilakukan melalui sektor riil (sektor barang), sektor moneter (keuangan), sektor internasional (perdagangan dan keuangan internasional), dan sektor tenaga kerja serta sektor pemerataan (W. Partowidagdo, 1999, *Memahami Analisis Kebijakan-Kasus Reformasi Indonesia*, hal 16).

Aktivitas dari tugas-tugas pemerintah tersebut diimplementasikan dalam berbagai program pembangunan sosial-ekonomi yang mempunyai *goal target*, yaitu kesejahteraan masyarakat yang ada dalam cakupan wilayah pemerintahan tertentu; baik pemerin-

tahan provinsial, pemerintahan kabupaten ataupun kota.

Pada intinya, pelaksanaan pembangunan seutuhnya senantiasa menempatkan manusia sebagai titik sentral. Pembangunan nasional ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam semua proses dan kegiatan pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik dari aspek fisik dan aspek intelegensinya. Parameter yang digunakan dalam aspek fisik misalnya dari tingkat kesehatan masyarakat. Sedangkan parameter yang digunakan dalam aspek intelegensinya adalah tingkat pendidikannya, serta aspek moralitas (iman dan ketaqwaan).

Proses transformasi perekonomian suatu regional dapat diamati dari kontribusi sektoral perekonomian terhadap total nilai tambah yang terjadi pada aktivitas seluruh sektor perekonomian di *region* tersebut. Dalam statistik regional, total nilai tambah tersebut dihimpun dalam akronim PDB, *Produk Domestik Bruto*, untuk suatu region yang bersifat nasional; sedangkan untuk level provinsial, kabupaten/kota ataupun kecamatan dinamai dengan terminologi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Tabel 1
Kontribusi Sektor Perekonomian, LPE (%) dan Kriteria Wilayah
Menurut Kecamatan di Kabupaten Subang, Tahun 2000

Nama Kecamatan	Aktivitas Perekonomian				Total	LPE	Kriteria Wilayah
	Pertanian	Industri	Perdagangan	Lainnya			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
010. Sagalaherang	55,10	1,60	28,02	15,28	100,00	9,52	Tradisional
020. Jalan Cagak	37,10	17,59	31,14	14,17	100,00	-1,74	Transisi
030. Cisalak	48,93	2,13	30,37	18,57	100,00	2,43	Tradisional
040. Tanjungsiang	44,98	0,72	31,13	23,17	100,00	9,39	Tradisional
050. Cijambe	40,92	2,96	28,10	28,02	100,00	1,23	Tradisional
060. Cibogo	53,05	0,95	27,47	18,53	100,00	4,52	Tradisional
070. Subang	20,21	4,69	20,43	54,67	100,00	6,76	Tradisional
080. Kalijati	31,44	14,04	26,00	28,52	100,00	6,09	Transisi
090. Cipeundeuy	29,24	22,91	29,02	18,83	100,00	-5,89	Semi-industri
100. Pabuaran	41,95	4,61	27,76	25,68	100,00	1,75	Tradisional
110. Patokbeusi	54,62	0,56	30,48	14,34	100,00	8,11	Tradisional
120. Purwadadi	31,78	22,12	36,14	9,96	100,00	6,91	Semi-industri
130. Cikau	60,96	1,34	16,53	21,17	100,00	1,66	Tradisional
140. Pagaden	49,68	2,08	28,94	19,30	100,00	8,44	Tradisional
150. Cipunaga	52,32	1,55	31,03	15,10	100,00	3,73	Tradisional
160. Compreng	56,77	0,39	29,68	13,16	100,00	2,28	Tradisional
170. Binong	55,71	0,86	29,30	14,13	100,00	3,72	Tradisional
180. Ciasem	46,33	2,21	28,40	23,06	100,00	-2,53	Tradisional
190. Pamanukan	44,96	5,05	27,93	22,06	100,00	6,57	Tradisional
200. Pusakanagara	53,25	0,30	32,68	13,77	100,00	5,35	Tradisional
210. Legonkulon	58,05	0,46	27,00	14,49	100,00	2,73	Tradisional
220. Blanakan	53,20	1,30	32,19	13,31	100,00	4,35	Tradisional
Total	40,44	5,02	25,76	28,78	100,00	4,11	Tradisional

Sumber : Bappeda Dan BPS. Kabupaten Subang, PDRB.Kab. Subang Menurut Lapangan Usaha Tahun-2000

Berkaitan dengan hal tersebut, suatu paparan kinerja perekonomian Kabupaten Subang ditampilkan dengan menggunakan hasil kompilasi data PDRB. Per Kecamatan Kabupaten Subang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000.

Dengan menerapkan kriteria UNIDO (Thee Kian Wee [1990], dan H.Suseno TW [1997]), diperoleh informasi kecamatan yang termasuk klasifikasi daerah tradisional dan non tradisional. Pemilahan tersebut dimaksudkan untuk lebih mempertajam kemungkinan permasalahan yang muncul sebagai latar dari banyaknya pekerja anak di masing-masing kecamatan. Lebih jauh fenomena tersebut memperlihatkan karakteristik wilayah yang secara teoritis akan melatarbelakangi pemunculan pekerja anak.

Dari hasil aplikasi kriteria tersebut, diperoleh informasi hanya kecamatan Kali Jati dan Jalan Cagak

sebagai daerah transisi, dan Kecamatan Purwadadi serta Cipeundeuy yang masuk sebagai kecamatan semi-industri; sedangkan kecamatan lainnya masih termasuk kecamatan dengan daerah aktivitas perekonomian tradisional (lihat Tabel 1.kolom 8).

Dari pengamatan selanjutnya diperoleh informasi bahwa pertumbuhan ekonomi pada masing-masing kecamatan selama Tahun 2000 terlihat positif, terkecuali Kecamatan Jalan Cagak, Cipeundeuy dan Ciasem, yang dapat menyimpulkan adanya pemulihan perekonomian di Kabupaten Subang.

Profil Pekerja Anak di Kabupaten Subang

Salah satu segmen penduduk yang terkena dampak krisis moneter, *medio Juli 1997*, yang berlanjut dengan krisis multi dimensi adalah

kelompok anak-anak. Padahal kita sepakat, bahwa anak merupakan sumber *asset* nasional, dimana salah satu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di negeri ini akan tergantung pada pembinaan secara utuh dan berkesinambungan.

Bila diamati paparan teoritis di atas, tidaklah heran apabila dampak paling luas dari krisis multidimensi, yang merupakan kelanjutan dari krisis moneter medio-Juli 1997, dirasakan secara kuat oleh segmen anak sebagai bagian dari habitat manusia yang mengalami krisis tersebut. Fenomena kuatnya gangguan tersebut dapat dilihat dari banyaknya anak yang menjadi anak jalanan dan penjaja koran/ makanan di jalan raya.

Suatu gambaran jumlah pekerja Anak di Kabupaten Subang dapat diperoleh dari berbagai sumber. Secara spesifik data ketenagakerjaan dari suatu wilayah yang berada di negeri ini dapat diperoleh dari kompilasi Hasil Sensus Penduduk (Tahun 1980, 1990 & 2000), data hasil kompilasi Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) dan yang terakhir dari data hasil kompilasi Survei Sosial-Ekonomi Nasional (SUSENAS).

Dalam setiap survei ketenagakerjaan yang dilakukan BPS untuk mengumpulkan informasi ketenagakerjaan, status pekerjaan dari segmen penduduk yang bekerja selalu dibedakan atas empat kategori; yaitu :

1. Berusaha sendiri
2. Berusaha dibantu orang lain, dalam hal ini dibantu oleh buruh tetap ataupun oleh anggota rumah tangga/ buruh tidak tetap.
3. Buruh/ karyawan/ pekerja
4. Pekerja keluarga, yang biasanya tidak mendapatkan bayaran.

Suatu survei yang merupakan perbesaran contoh dari Sakernas di Jawa Barat, dikenal dengan nama akronim SAKERDA (SURVEI ANGKATAN KERJA DAERAH); yang dilakukan Tahun 1992, 1994, 1996 dan 2000. Dari hasil survei tersebut diperoleh jumlah pekerja anak (penduduk usia 10-14 tahun yang bekerja) masing-masing sebanyak 3.341 orang pada tahun 1992, 6.046 orang anak pada tahun 1994, 3.103 orang anak di tahun 1996 dan 2.098 orang pekerja anak di tahun 2000 (lihat Tabel 2).

Tabel 2
Jumlah Pekerja yang Berusia (10 – 14) Tahun di Kabupaten Subang Menurut Jenis Kelamin, Tahun 1992-2000

Tahun	Jenis Kelamin		Total	Jumlah yg Bekerja	Rasio Anak Yg Bekerja	Kriteria Wilayah
	Laki-laki	Perempuan				
1992	2 346	995	3 341	470 003	7,11	tradisional
1994	4 835	1 211	6 046	532 894	11,35	tradisional
1996	547	2 556	3 103	594 810	5,22	tradisional
2000	1 224	874	2 098	583 648	3,59	tradisional
2000*	4 476	4 090	8 566	649 312	13,19	tradisional

Sumber : Bappeda & BPS. Jawa Barat, Sakerda Tahun 1992-2000
BPS., Penduduk Jawa Barat- Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000.

Catatan : *) = data hasil kompilasi Sensus Penduduk Tahun 2000

Dari hasil kompilasi Sensus Penduduk Tahun 2000, dengan menggunakan teknik pengumpulan data "sensus lengkap (*complete enumeration*)"; diperoleh hasil yang cukup mengejutkan yaitu sebanyak 8.566 orang anak yang menjadi pekerja dan menyebar di 22 administrasi pemerintahan kecamatan (lihat Tabel 3).

Lebih jauh, dengan menggunakan teknik angka indeks; dihitung indeks Sumber Daya Manusia (SDM)

yang pada dasarnya untuk melihat kecamatan mana yang membutuhkan penanganan secara dini. Sebagai hasilnya, Kecamatan Sagalaherang, Tanjung siang, Cijambe, Patokbeusi, Purwadadi, Pagaden, Cipunaga, Binong dan Pusakanagara merupakan kecamatan yang memiliki angka indeks di atas seratus. Yang berarti secara harfiah, banyak penduduk yang turun ke pasar kerja.

Tabel 3
TPAK, TPT dan Jumlah Pekerja Anak Perempuan dan Laki-laki Menurut Kecamatan di Kabupaten Subang, Tahun 2000

Nama Kecamatan	Jenis Kelamin		Total Pekerja Anak	Jumlah Yg Kerja*)	Rasio Pekerja Anak	TPT	TPAK	Indeks SDM
	Laki-Laki	Perempuan						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
010. Sagalaherang	152	138	290	23810	12.18	4.78	63.08	101.04
020. Jalan Cagak	263	229	492	33595	14.65	4.50	60.19	96.41
030. Cisolak	127	104	231	22232	10.39	5.89	60.56	97.00
040. Tanjungsiang	69	41	110	22331	4.93	5.48	67.98	108.89
050. Cijambe	149	125	274	19242	14.24	6.47	69.29	110.99
060. Cibogo	19	12	31	9822	3.16	0.43	43.38	69.49
070. Subang	407	375	782	52177	14.99	4.96	58.65	93.95
080. Kalijati	247	243	490	34884	14.05	0.62	59.60	95.47
090. Cipeundeuy	55	59	114	18513	6.16	3.98	61.79	98.97
100. Pabuaran	166	147	313	30739	10.18	1.13	57.94	92.81
110. Patokbeusi	560	569	1129	38076	29.65	1.92	68.53	109.77
120. Purwadadi	152	118	270	28408	9.50	3.84	67.98	108.89
130. Cikaum	98	91	189	22072	8.56	3.67	61.72	98.86
140. Pagaden	217	211	428	44499	9.62	3.71	70.97	113.68
150. Cipunaga	61	71	132	33207	3.98	0.70	73.13	117.14
160. Comprang	34	30	64	16816	3.81	3.13	51.68	82.78
170. Binong	358	339	697	39584	17.61	8.88	68.94	110.43
180. Ciasem	590	530	1120	47564	23.55	1.52	60.43	96.80
190. Pamanukan	416	415	831	38452	21.61	3.74	59.00	94.51
200. Pusakanagara	88	86	174	31782	5.47	3.86	66.07	105.83
210. Legonkulon	96	70	166	16320	10.17	2.76	55.07	88.21
220. Blanakan	152	87	239	25187	9.49	3.78	57.46	92.04
Total	4476	4090	8566	649312	13.19	3.70	62.43	100.00

Sumber : BPS. Jawa Barat, dari berbagai penerbitan Hasil Sensus Penduduk Tahun-2000
Catatan : *) = segmen penduduk usia 10 tahun ke Atas.

Selanjutnya ada suatu informasi yang cukup krusial, di mana tiga kecamatan dari kelompok kecamatan tersebut, yaitu Sagalaherang, Ci-jambe, dan Patokbeusi memiliki angka rasio pekerja anak terhadap jumlah penduduk yang bekerja cukup tinggi. Hal ini dapat diinterpretasikan perlu adanya pengamatan khusus, apakah yang terjadi ke pasar kerja termasuk segmen penduduk usia (10–14) tahun.

Secara teoritis, anak dalam proses tumbuh kembangnya berada dalam lingkaran *konsentris*, di mana setiap lingkaran mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung bagi perkembangan hidupnya. Lingkaran pertama yang mengelilingi anak adalah lingkungan terdekatnya yang memiliki kontak langsung dengannya, misalnya keluarga, teman bermain, teman sekolah dan guru. Lingkaran berikutnya yang lebih luas adalah lingkaran dalam konteks sosial dan ekonomi, misalnya lokasi tempat tinggal, apakah di wilayah perkotaan atau pedesaan, pekerjaan orang tua, latar belakang pendidikan orang tua, dan sebagainya. Lingkaran ke tiga, adalah dalam konteks budaya, yaitu yang meliputi semua nilai (norma-norma), sikap, kepercayaan dan pedoman perilaku bagi orang-orang yang hidup dalam masyarakat tersebut, misalnya sikap gotong-royong, hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat dan pemerintah, dan sebagainya (U. Brofenbrenner [1989] seperti dikutip dalam BPS. DKI-Jakarta [2001]).

Untuk itu dicoba mengungkapkan bagaimana sebenarnya suatu pengaruh kemiskinan wilayah terhadap besaran pekerja anak. Di mana untuk mengukur kemiskinan wilayah tersebut digunakan kriteria UNIDO dan rasio pekerja anak mencerminkan

banyaknya segmen penduduk usia (10-14) tahun yang ikut bekerja per seribu penduduk usia kerja (Usia sepuluh tahun ke atas).

Dari kompilasi yang dilakukan terhadap formula T-Kruskal Wallis dengan menggunakan data yang dipaparkan pada Tabel 4, diperoleh besaran :

$$T = \frac{12}{N(N+1)} \times [\sum (R_i)^2 / n_i] - 3(N + 1) = 1,7206862 \approx 1,721$$

Angka yang diperoleh dari tabel Kai Kuadrat (*Chi square*) dengan derajat keyakinan (*level of significance*) 0,05 dan derajat kebebasan (*degrees of freedom*) $v = (k-1) = 2$, adalah 5,991. Dengan melakukan komparasi terhadap ke dua angka tersebut disimpulkan H_0 diterima; dimana hypotheses yang dibentuk adalah sebagai berikut:

1. H_0 = Klasifikasi wilayah dengan kriteria UNIDO *tidak berpengaruh* terhadap rasio pekerja anak.
2. H_A = Klasifikasi wilayah dengan kriteria UNIDO *ada pengaruhnya* terhadap rasio pekerja anak.

Dengan demikian, bila menggunakan kriteria ekonomi makro, dapat disimpulkan kemiskinan (yang dicerminkan dengan daerah tradisional) memiliki pengaruh yang kuat terhadap keinginan anak untuk melepaskan masa kecilnya dan cenderung memilih lebih baik bergelut dalam aktivitas ekonomi keluarga; di sisi lain pengaruh transformasi perekonomian (yang dicerminkan dengan daerah transisi dan semi-industri) mendorong anak untuk berkeinginan memiliki “uang sendiri”.

Tabel 4
Kompilasi Hubungan Pengaruh Kriteria UNIDO
Terhadap Rasio Pekerja Anak di Kabupaten Subang, Tahun 2000

No	Tradisional			Transisi			Semi Industri				
	Kecamatan	Rasio	Rank	Kecamatan	Rasio	Rank	Kecamatan	Rasio	Rank		
1	Sagalaherang	12,18	14	Jalancagak	14,65	17	Cipeundeuy	6,16	6		
2	Cisalak	10,39	13	Kalijati	14,05	15	Purwadadi	9,50	9		
3	Tanjungsiang	4,93	4								
4	Cijambe	14,24	16								
5	Cibogo	3,16	1								
6	Subang	14,99	18								
7	Pabuaran	10,18	12								
8	Patokbeusi	29,65	22								
9	Cikaum	8,56	7								
10	Pagaden	9,62	10								
11	Cipunaga	3,98	3								
12	Compreng	3,81	2								
13	Binong	17,61	19								
14	Ciasem	23,55	21								
15	Pamanukan	21,61	20								
16	Pusakanagara	5,47	5								
17	Legonkulon	10,17	11								
18	Blanakan	9,49	8								
Jumlah Kecamatan = 18			206	Jumlah kecamatan=2			32	Jumlah kecamatan=2			15

Sumber : Tabel 1 & 3.

H.S. Dillon dan *Hermanto* (1993) seperti dikutip dalam *E.Sastraatmadja* (1994), telah menegaskan bahwa secara umum ada dua cara orang memandang kemiskinan. Sebagian orang berpendapat bahwa kemiskinan adalah suatu proses, sedangkan sebagian lagi memandang kemiskinan sebagai suatu akibat atau fenomena di dalam masyarakat. Sebagai suatu proses, kemiskinan mencerminkan kegagalan suatu sistem masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya dan dana secara adil kepada anggota masyarakatnya.

Dengan demikian, diakui bahwa salah satu ukuran ketidakberhasilan dalam menata perekonomian, baik nasional maupun regional (provinsi/kabupaten/ kota); ialah meningkatnya derajat kemiskinan di wilayah tersebut. Salah satunya adalah insiden kemiskinan penduduk. Sehingga tingginya derajat kemiskinan merupakan *surrogate marker* (pertanda utama)

dari ketidakmampuan dan disharmonis perencanaan perekonomian yang dibuat dan lebih buruk lagi merupakan suatu tanda ketidakpedulian terhadap masalah perekonomian wilayah.

Suatu usulan yang dikemukakan untuk mengeliminasi kemiskinan adalah dengan pemberian kesempatan mendapatkan pendidikan dan peningkatan keterampilan melalui jenjang pendidikan.

Namun demikian, *Schiller* (1973) mengingatkan bahwa peningkatan keterampilan melalui jenjang pendidikan tidak selalu mampu mengatasi masalah kemiskinan. Dalam hal ini perlu diperhatikan kemampuan perekonomian negara untuk menyerap tenaga kerja tersebut. Di satu pihak, peningkatan keterampilan baru merupakan salah satu faktor penawaran, sementara di lain pihak, tidak pula dapat diabaikan faktor permintaan terhadap tenaga kerja itu sendiri.

Dengan perkataan lain, pada gilirannya, pendidikan berkaitan dengan pendapatan yang memiliki arti penting dalam kesejahteraan anak. Schiller (1973) mengemukakan tiga alasan utama mengenai jenjang pendidikan sangat mempengaruhi tingkat pendapatan. *Pertama*, tingkat pendidikan akan mempengaruhi tingkat produktivitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai akibat dari penambahan pengetahuan dan keterampilan. *Kedua*, dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan terbuka kesempatan kerja yang lebih luas. *Ketiga*, lembaga-lembaga pendidikan, dalam hal-hal tertentu, dapat berfungsi selaku badan penyalur tenaga kerja. Tersirat dari hal ini bahwa mereka yang berpendidikan tinggi akan mendapat perlakuan istimewa dalam pasar kerja. Namun tidak dapat dilupakan bahwa untuk memperoleh pendidikan tersebut diperlukan investasi yang tidak kecil. Namun demikian, Esmara (1986) mengatakan bahwa kenaikan jenjang pendidikan ini tidak hanya berpengaruh kepada tingkat pendapatan melainkan mencakup cakrawala yang jauh lebih luas daripada yang diduga semula. Kenaikan jenjang pendidikan akan mengubah pula tata cara kehidupan, kebiasaan, lapangan kerja, atau dalam hal kebudayaan, sehingga secara keseluruhan mempunyai dampak yang cukup besar terhadap kehidupan suatu bangsa.

Kesimpulan dan Saran

Seperti dipaparkan dalam Pendahuluan, salah satu faktor krusial yang harus di perhatikan; anak merupakan sumber *asset* nasional di mana salah satu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di negeri ini akan tergantung pada pembinaan segmen ini secara utuh dan berkesinambungan.

Pemerintah sebetulnya sudah berusaha menempatkan orang tua sebagai penanggung jawab dan sekaligus pelaksana utama dan pertama bagi upaya pembinaan anak. Pene-gasan akan fungsi keluarga ditekan-kan pula dalam UU No 10/Tahun 1992 tentang "Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera", di mana terdapat 8 fungsi keluarga yaitu: 1. fungsi keagamaan, 2. fungsi sosial-budaya, 3. fungsi cinta kasih, 4. fungsi reproduksi, 5. fungsi pendidikan dan sosialisasi, 6. fungsi ekonomi, 7. fungsi melindungi, dan 8. fungsi pembinaan lingkungan.

Salah satu cara pendekatan untuk mengetahui seberapa besar permasalahan yang menimpa segmen anak, ialah dengan melalui penelusuran data baik melalui *survei* ataupun *catatan-catatan* administrasi yang terjadi di wilayah pemerintahan di mana anak tersebut berdomisili.

Dari hasil kompilasi yang dilakukan, rasio pekerja anak terhadap jumlah penduduk yang bekerja seluruhnya adalah 13,19; berarti setiap seratus penduduk yang bekerja ada 13 s/d 14 anak yang bekerja di Kabupaten Subang (lihat Tabel 3). Dari informasi tersebut, kebijakan mendasar perlu dilakukan oleh Pemda Kabupaten Subang dalam membaca permasalahan pekerja anak.

Suatu uji *hypotheses* yang dilakukan terhadap kemungkinan hanya daerah tradisional sebagai kontributor dari pekerja anak, secara statistik ditolak karena yang menyumbang pekerja anak ternyata juga dari daerah yang relatif maju. Dengan demikian, secara teoritis berbagai aspek perlu dikaji secara cermat dikaitkan dengan kondisi dan situasi yang terjadi di Kabupaten Subang.

Dari aspek teori, pekerja anak merupakan *bye product* (produk ikutan) yang mau tidak mau akan tercipta

meskipun hal tersebut tidak dikehendaki terjadinya pada setiap proses program pembangunan sosioekonomi. Dari persepsi ini, adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk menghilangkan secara mutlak besaran jumlah pekerja anak; hal ini disebabkan berbagai aspek yang melatarbelakangi pola kejadiannya.

Meskipun demikian secara formal perlu dilakukan penataan oleh Pemda Kabupaten Subang terutama dari aspek *soft-ware*; yaitu PERDA yang mengatur perlindungan anak, dan larangan bagi pengusaha untuk mempekerjakan anak di bawah usia yang direkomendasikan. Dan di sisi lain perlu pula adanya kontrol atas pelaksanaan PERDA tersebut dengan memberikan sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya.

Untuk mengeliminasi permasalahan pekerja anak tersebut, saran-saran perbaikan yang sangat *urgen* untuk dilakukan ialah :

1. Perlu dilakukan suatu kebijakan pemberian kesempatan bersekolah

secara gratis, khusus untuk rumah-tangga yang teridentifikasi sebagai rumah-tangga miskin dan memantau secara terus menerus anak-anak yang ada dalam kelompok rumah-tangga tersebut.

2. Perlu dilakukan koneksi antar instansi dalam pembangunan jaringan data yang menggunakan data rumah-tangga miskin baik menurut jenis aktivitas, pemberdayaan ataupun bentuk bantuan yang diperlukan dan yang akan diberikan; sehingga terjadi keterpaduan pada suatu sisi secara sinergi yang akan merubah pada sisi yang lain untuk objek yang sejenis.

Dengan harapan hasil yang diperoleh akan bermanfaat sebagai bahan informasi dalam penyusunan perencanaan sosio-ekonomi yang dilakukan di Kabupaten Subang, dan sekaligus akan merupakan salah satu faktor yang diperhitungkan dalam sistem pengambilan keputusan (*decision support system*) saat menentukan kebijakan eliminasi pekerja anak.

Daftar Pustaka

- Adelman I. And Morris C.T. 1973. *Economic Growth And Social Equity in Developing Countries*. Stanford-Stanford University Press.
- BAPEDA & BPS. Jawa Barat. 2003. *Analisis Komposisi Tenaga Kerja Per Kecamatan di Jawa Barat - Tahun 2000*.
- BAPEDA & BPS. Kab. Subang, Desember 2001, *PDRB Per Kecamatan di Kabupaten Subang Tahun 1996-2000*.
- BAPPEDA & BPS. Jawa Barat, *Sakerda Tahun 1992-2000* (berbagai penerbitan)
- BPS. *Penduduk Jawa Barat-Hasil Sensus Penduduk Tahun 1990 & 2000* (berbagai penerbitan).
- BPS. Desember 2001. *Indikator Kesejahteraan Anak 2000*. Jakarta.
- BPS. 2002. *Statistik Indonesia 2001*. Jakarta.
- BPS. DKI-Jakarta, Desember 2001. *Analisis Situasi Anak dan Pemuda DKI-Jakarta 2001*.
- BPS. Jawa Barat. 2002. *Karakteristik Penduduk Kab. Indramayu-Hasil SP Tahun 2000* (katalog BPS: 2116.3212).

- Esmara H. 1986. *Perencanaan dan Pembangunan Di Indonesia*, Gramedia-Jakarta.
- Galbraith J. K. 1979. *The Nature Of Mass Poverty*, Cambridge – Harvard University Press.
- Koyoshi W. 1987. *Principle And Application of Value Added Productivity Analysis*
- H. Suseno T. W. 1997. "Transformasi industri Manufaktur dan Implikasi Ketenagakerjaan", Business News No 692/ Tahun XIV/ 1997 – Jakarta.
- Schiller B. R. 1973. *The Economics Of Poverty And Discrimination*, Englewood Cliffs – Prentice Hall.
- Stephen J. Woodhouse, sambutan Kepala UNICEF pada Lokakarya Nasional, Tentang "Perlindungan Anak di Indonesia", Jakarta 24 - 25 April 1998.
- Thee Kian Wee, *Prisma* No2/1990, "Perubahan ke Arah Industrialisasi Berorientasi Ekspor – Peluang dan Rintangan". Jakarta
- W. Partowidagdo. 1999. *Memahami Analisis Kebijakan-Kasus Reformasi Indonesia*. Bandung.